RUU TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN (OMNIBUS LAW)

AKD: RUU TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN (OMNIBUS LAW)

Bulan: September 2020

Oleh: RUU TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN (OMNIBUS LAW)

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020)

Tahap : Terdaftar

Pengusul : Pemerintah

OMNIBUS LAW adalah Undang Undang yang bersifat sapu jagat untuk memangkas beberapa Undang Undang sekaligus , mengatasi tumpang tindihnya peraturan,merampingkan regulasi dari segi jumlah,menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Berdasarkan draf RUU Omnibus Law Perpajakan terdapat 23 pasal yang diatur untuk menyokong investasi dan penguatan perpajakan yakni :

Pasal 1, berisi gambaran umum dan latar belakang RUU Omnibus Law Perpajakan.

Pasal 2, mengatur tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk lima hal, yakni meningkatkan pendanaan investasi, menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, mendorong sektor prioritas skala nasional, dan meningkatkan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dalam rangka penguatan perekonomian.

Pasal 3, tentang penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan?dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Pasal 4, terkait perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri.

Pasal 5, soal pengaturan tarif PPh atas bunga.

Pasal 6 mengenai pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi

Pasal 7 membahas pengaturan pengkreditan pajak masukan

Pasal 8 soal pengaturan mengenai sanksi administratif

Pasal 9 terkait sanksi administratif berupa bunga

Pasal 10 tentang pengaturan mengenai sanksi administratif berupa denda

Pasal 11 tentang pengaturan pengenaan bunga

Pasal 12 yakni pengaturan mengenai imbalan bunga

Pasal 13 meliputi pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan

Pasal 14 soal perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pasal 15 tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE.

Pasal 16 tentang pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri

Pasal 17 tentang pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan.

Pasal 18 tentang pengaturan mengenai pajak daerah

Pasal 19 mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan sejak undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 20 mengatur peraturan pelaksana pada saat undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 21 mengatur pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas PPh yang ditetapkan sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 22 menjabarkan perubahan atas aturan lama Pasal 23 menetapkan undang-undang ini mulai berlaku

Ada 9 Undang Undang yang dirangkum dalam Omnibus Law Perpajakan yakni :

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

2. UU Pajak Penghasilan (PPh)

3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

4. UU Kepabeanan

5. UU Cukai

6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

7. UU Penanaman Modal

8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

9. UU Pemerintah Daerah

Sumber kutipan
https://peraturanpajak.com/2020/02/18/download-ruu-omnibus-law-perpajakan-ruu-ketentuan-dan-fasilitas-perpajakan/

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	INI LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEMERINTAH MENGGODOK RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN	https://www.kemenkeu.go.id/pub \nlikasi/berita/ini-latar-belaka \nng-dan-tujuan-pemerintah-mengg \nodok-ruu-ketentuan-dan-fasilit \nas-perpajakan/
Berita	INILAH POIN-POIN PENTING DI RUU PERPAJAKAN YANG BARU	https://nasional.kontan.co.id/ \nnews/inilah-poin-poin-penting- \ndi-ruu-perpajakan-yang-baru \n
Berita	KETENTUAN TARIF BARU PPH PASAL 25: NAVIGASI PERPAJAKAN	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/11082
Berita	REVISI UU KUP MENCAKUP PERLUASAN KETENTUAN PERMINTAAN INFORMASI PERPAJAKAN	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/8680
Berita	RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN DISERAHKAN KE DPR TAHUN INI	https://economy.okezone.com/re \nad/2019/09/05/20/2101166/ruu-k \netentuan-dan-fasilitas-perpaja \nkan-diserahkan-ke-dpr-tahun-in \ni
Berita	RUU PERPAJAKAN BARU: PEMERINTAH PANGKAS PPH BADAN, HAPUS PPH DIVIDEN, TURUNKAN DENDA PAJAK	https://setkab.go.id/ruu-perpa \njakan-baru-pemerintah-pangkas- \npph-badan-hapus-pph-dividen-tu \nrunkan-denda-pajak/
Berita	SOAL RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN, INI KOMENTAR ANGGOTA DPR: REFORMASI PERPAJAKAN	https://news.ddtc.co.id/soal-r \nuu-ketentuan-dan-fasilitas-per \npajakan-ini-komentar-anggota-d \npr-17030
Berita	TUNTASKAN REVISI UU KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/8652
Berita	‘OMNIBUS LAW’ PERPAJAKAN DIHARAP TINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NASIONAL	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/27539/t/%E2%80%98Omnib \nus+Law%E2%80%99+Perpajakan+Dih \narap+Tingkatkan+Penerimaan+Paj \nak+Nasional
Jurnal	ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN INSENTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	http://berkas.dpr.go.id/pusatp \nuu/jurnal-prodigy/public-file/ \njurnal-prodigy-public-4.pdf \n
Jurnal	ASAS “DAPAT DILAKSANAKAN” DALAM PERATURAN PERPAJAKAN	https://ejurnal.pajak.go.id/st \n/article/view/30/13
Jurnal	DESENTRALISASI KEBIJAKAN FISKAL : DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN PUSAT DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/buku_lintas_tim/buku-li \nntas-tim-public-37.pdf?1600076 \n948
Jurnal	OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MELALUI REFORMASI PERPAJAKAN	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-IX-12-II-P3DI-Juni-2017-2 \n49.pdf?1600076777
Jurnal	PENGATURAN PERPAJAKAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM PAJAK INDONESIA	https://journal.uii.ac.id/IUST \nUM/article/view/4728/4164
Jurnal	PENYAMAAN PERSEPSI DAN KERJASAMA DALAM PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	https://jurnal.uns.ac.id/yusti \nsia/article/view/8708/7798 \n
Jurnal	PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/jurnal_kepakaran/Ekonom \ni%20&%20Kebijakan%20Publik-1-1 \n-Juni-2010.pdf?1600077179
Jurnal	STRATEGI PERPAJAKAN 2015	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-VII-3-I-P3DI-Februari-201 \n5-55.pdf?1600077128
Buku	MANAJEMEN PERPAJAKAN	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=129 \n56&keywords=pajak

Buku	PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=134\n11&keywords=pajak
Buku	PAJAK DI INDONESIA	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=327\n49&keywords=pajak
Buku	REFORMASI: MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KESETARAAN PERPAJAKAN	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=329\n14&keywords=pajak
Undang-undang & Peraturan	DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN	https://pajaksite.files.wordpr\ness.com/2020/02/draft-omnibusl\naw-perpajakan.pdf
Undang-undang & Peraturan	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN	https://lokataru.id/wp-content\n/uploads/2020/02/Naskah-Akadem\nik-RUU-Omnibus-Law-Perpajakan.\npdf.pdf.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nlltext/2007/38TAHUN2007PP.HTM\n
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/5832/pp-no-12-tahun\n-2017
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 PERANGKAT DAERAH	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/5739/pp-no-18-tahun\n-2016
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/82994/pp-no-24-tahu\nn-2018
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/104998/pp-no-24-tah\nun-2019
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/4841
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/107867/pp-no-39-tah\nun-2019
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/4859/pp-no-45-tahun\n-2008
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	https://jdih.kominfo.go.id/pro\nduk_hukum/view/id/695/t/peratu\nran+pemerintah+nomor+71+tahun+\n2019+tanggal+10+oktober+2019\n
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/122033/pp-no-72-tah\nun-2019
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2010 JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/5116/pp-no-91-tahun\n-2010

Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NO. 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	https://peraturan.bpk.go.id/Ho \nme/Details/53229/perpu-no-5-ta \nhun-2008
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	https://luk.staff.ugm.ac.id/at \nur/PP82-2012TransaksiElektroni \nk.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL	https://peraturan.bpk.go.id/Ho \nme/Details/40374
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL	https://www.hukumonline.com/pu \nsatdata/detail/lt536370ee023b5 \n/node/257/peraturan-presiden-n \nomor-39-tahun-2014
Undang-undang & Peraturan	PROSES PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/690
Undang-undang & Peraturan	PROSES PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/661
Undang-undang & Peraturan	PROSES PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/413
Undang-undang & Peraturan	RISALAH RAPAT RUU TTG PEMERINTAHAN DAERAH	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/394
Undang-undang & Peraturan	RUU TENTANG CUKAI	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/381
Undang-undang & Peraturan	RUU TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/237
Undang-undang & Peraturan	RUU TENTANG KEPABEANAN	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/563
Undang-undang & Peraturan	RUU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/406
Undang-undang & Peraturan	RUU TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/319
Undang-undang & Peraturan	RUU TENTANG PENANAMAN MODAL	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/222
Undang-undang & Peraturan	RUU TENTANG PERUBHAAN ATAS UU NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN	http://www.dpr.go.id/arsip/ind \nexlg/id/199
Undang-undang & Peraturan	UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d \nocument/uu/UU_2007_25.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG R EPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d \nocument/uu/UU_2009_16.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d \nocument/uu/502.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d \nocument/uu/503.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d \nocument/uu/UU_2008_11.pdf

Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_12.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1749.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/381.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_17.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1683.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1605.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_28.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_36.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_36.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_39.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_42.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/739.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/740.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/615.pdf

Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d \nocument/uu/741.pdf
Surat kabar	OPINI : KEBAJIKAN DALAM PUNGUTAN PAJAK	https://ekonomi.bisnis.com/rea \nd/20190411/259/910587/opini-ke \nbajikan-dalam-pungutan-pajak \n
Surat kabar	OPINI: APA KABAR REFORMASI PERPAJAKAN?	https://ekonomi.bisnis.com/rea \nd/20190321/259/902717/opini-ap \na-kabar-reformasi-perpajakan \n